

PERAN SOSIOLOGI AGAMA DALAM PEMECAHAN MASALAH BUDAYA DAN PERILAKU KORUPSI

Sinarwidi

Program Doktoral PPS Universitas Muhammadiyah Malang

Email: sinarwidi2016@gmail.com

Abstract

One of the social phenomena that has always been toxic to society is corruption. The corrupt behavior that has become a social problem faced by most countries in the world, especially the state of Indonesia. Indonesia which has a myriad of corrupt practices then the impact is squalor everywhere. And most of the object is always fixed on the lower classes. Corruption is indeed a factor inhibiting the wheels of organizations and institutions in achieving the goals of organizations and institutions that exist in society. This paper seeks to reveal the role of religious sociology in relation to participate in providing solutions of corruption cases that exist in the community.

Keywords: Sociology Of Religion, Culture Of Corruption

Abstrak

Salah satu fenomena sosial yang selalu menjadi racun bagi masyarakat adalah korupsi. Perilaku korupsi yang sudah menjadi masalah sosial yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Indonesia yang memiliki segudang praktik-praktik korupsi maka imbasnya adalah kemelaratan dimana-mana. Dan sebagian besar objeknya selalu tertuju pada kaum kelas bawah. Korupsi memang menjadikan faktor penghambat roda organisasi maupun institusi dalam pencapaian tujuan organisasi maupun lembaga yang ada dalam masyarakat. Tulisan ini berupaya untuk mengungkap peranan sosiologi agama dalam kaitannya untuk ikut memberikan solusi dari kasus korupsi yang ada dimasyarakat.

Kata Kunci: Sosiologi Agama, Budaya Korupsi

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

Pendahuluan

Di Indonesia korupsi telah menjadi budaya yang memasuki berbagai ranah kehidupan, terutama di lingkungan birokrasi yang *sophisticated*. Perilaku korupsi merupakan sesuatu yang mengerikan dan dapat mengancam eksistensi suatu bangsa. Theobald (1990: 112 dalam Sanjivi Guhan) menyatakan, bahaya korupsi bagi kehidupan seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus.¹ Bahaya korupsi terhadap individu dan masyarakat dapat dijelaskan bahwa jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri dan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Korupsi juga membahayakan terhadap moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat.

Korupsi juga membahayakan moral dan intelektual masyarakat. Dalam hal ini, perilaku korupsi dapat menimbulkan iklim ketakutan, *selfishness*, dan *sinisism*. Seperti publikasi yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa masyarakat terlanjur sinis terhadap korupsi yang akut di Indonesia seperti tidak mungkin diberantas. Survei yang dilakukan UNDP juga menjadi indikasi kuat, dimana hasil survei menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik dianggap sangat lazim oleh 75% responden. Sebanyak 65% responden bahkan tidak hanya menduga tentang praktik korupsi tetapi terlibat secara langsung dalam praktik ini terutama menyangkut pejabat pemerintah. Dalam penelitian UNDP, dari 40% responden yang telah melihat kasus korupsi, kurang dari 10% yang dilaporkan. Responden rumah tangga menempati persentase tertinggi dalam hal tidak melaporkan kasus korupsi (98%). Hal yang kurang lebih sama terjadi pada hasil penelitian ICW. Sebanyak 43,7% responden tidak melaporkan korupsi; 29,9% menegur dan 26% melaporkan survei UNDP menemukan bahwa alasan utama tidak melaporkan korupsi karena mereka tidak tahu ke mana harus melapor (51%), kasus tidak dapat dibuktikan (34%), proses yang berbelit-

¹Sanjivi Guhan and Paul Samuel, *Corruption in India: Agenda for Action* (Public Affairs Centre, 1997).

belit dan panjang (27%) dan menganggap investigasi tidak akan dilakukan meski telah dilaporkan (20,8%). Dalam sebuah negara yang sudah dilanda korupsi pada tingkat itu, biasanya masyarakat menjadi sinis terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi.² Orang tidak lagi percaya korupsi bisa diberantas. Karena, seperti dalam kasus di Indonesia, korupsi sudah sejak puluhan tahun dibicarakan, baik di forum-forum resmi maupun di media-media massa. Rakyat juga telah mendengar dan tahu banyak tentang betapa jahatnya korupsi; tentang perlunya mengikuti kaidah-kaidah hukum dan akibat-akibat yang bisa ditimbulkannya. Namun, hingga era reformasi ini, korupsi tetap saja jalan terus.

Hal senada juga dinyatakan Hariandi Hafid (2016) dalam Lembaga Transparency International (TI) yang merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, terdapat 168 negara yang diamati. Negara di peringkat teratas adalah Denmark, Finlandia, Swedia, Selandia Baru, Belanda, dan Norwegia. Sedangkan negara dengan peringkat terbawah adalah Sudan Selatan, Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somsepalia. Indonesia sendiri menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Ilham mengatakan, peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. “KPK sangat berperan,” kata dia. Menurut Ilham, peringkat pada negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor rata-rata tahun ini adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Dalam memecahkan masalah korupsi tentu tidak ada suatu elemen atau ilmu dan teori dapat berdiri sendiri akan tetapi merupakan kombinasi dari berbagai aspek untuk mengatasinya. Dalam hal ini salah satu ilmu yang digunakan untuk memecahkan persoalan korupsi adalah sosiologi agama.³ Sosiologi agama memiliki kronologi kelahiran dari cabang ilmu sosial yaitu disiplin sosiologi umum. Sedangkan ilmu sosiologi umum

²Nurjannah Intan, *Salahkah George berantas korupsi?* (Jogja Bangkit Publisher, 2010).

³*Esai-esai sosiologi agama* (Diva Pustaka, 2006); Edi AH Iyubenu, *Sosiologi Agama* (Ircisod, 2002).

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

atau sosiologi melahirkan ilmu sosiologi agama yang mengkaji peran agama dan masyarakat.⁴ Setiap agama yang menjadi pembahasan sosiologi memiliki nilai-nilai luhur dari tiap agama yang dianut pemeluknya yang tergabung dalam suatu kaum, kelompok atau masyarakat⁵. Karena agama mengandung nilai-nilai luhur yang mengajarkan kesalehan dan nilai—nilai kebaikan yang dianut oleh para pemeluknya, tentu secara ideal harus mampu menjadi benteng untuk menghalangi berperilaku korupsi bagi tiap pemeluk agama. Oleh karena itu perlu dikaji dan perlu dipertanyakan peran ilmu sosiologi agama dalam mengurangi atau mengikis budaya korupsi hingga saat ini.

Sedangkan tujuan penulisan berupaya bagaimana fenomena sosial (korupsi) ditinjau dari pendekatan sosiologi agama. Adapun penulis mencoba memetakan pikiran-pikirannya sebagai berikut:

1. Makna dan perilaku korupsi dikalangan masyarakat
2. Sosiologi Korupsi vs. Sosiologi Agama
3. Peran sosiologi Agama dalam perilaku korupsi

Kajian Teoritis

1. Makna dan Perilaku Korupsi dikalangan Masyarakat

Istilah *korupsi* berasal dari kata *corrupt* yang berasal dari bahasa latin *com* (bersama-sama) dan *rumpere* (pecah/jebol). Pengertian *bersama-sama* mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan latar belakang kekuasaan.⁶ Mengenai konotasi dari *rumpere* merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi. Artinya, tindakan korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Bersama-sama juga diartikan sebagai lebih dari satu orang atau dapat pula dilakukan oleh satu orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan orang lain. Tentunya kekuatan atau kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Mengenai konotasi dari *rumpere* yang berarti pecah atau jebol merujuk pada pengertian dampak atau akibat dari perbuatan korupsi (bahasa latin lain adalah *corruptus*). Artinya, tindakan

⁴Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi agama: kajian tentang perilaku institusional dalam beragama anggota Persis dan Nahdlatul Ulama* (Refika Aditama, 2007).

⁵Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi agama: kajian tentang perilaku institusional dalam beragama anggota Persis dan Nahdlatul Ulama* (Refika Aditama, 2007).

⁶Binawan and Magnis-Suseno, *Korupsi kemanusiaan*.

korupsi dapat mengakibatkan kehancuran atau kerugian besar. Inilah yang membedakan pengertian tindak korupsi dengan tindak kriminal biasa seperti pencurian. Tindak pidana pencurian hanya mengakibatkan kerugian sepihak, yaitu kerugian bagi korban, sedangkan korupsi dapat merugikan tidak hanya banyak orang akan tetapi juga negara dalam jumlah besar.

Dari sekian banyak definisi tentang korupsi selalu menganalogkan atau mengkaitkan sebagai bentuk tindakan ilegal atau melanggar hukum, tidak bermoral, dan tidak loyal dari seseorang yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kekuasaan berupa jabatan atau kedudukan merupakan sarana dan sekaligus alat untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Definisi terkini tentang Korupsi saat ini sudah mulai meluas pada cakupan moral. Tindak ‘Korupsi’ bukan hanya sekedar kesempatan untuk memanfaatkan jabatan/posisi, akan tetapi juga peluang untuk mendorong terjadinya tindak Korupsi.

Robert Klitgaard menyebut korupsi sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Mubyarto memahami korupsi lebih sebagai masalah politik daripada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai.

Pengertian korupsi menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio* atau *corruptus*“. Namun kata “*corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*corrumpere*“, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

Sedangkan dalam UU No.31 Tahun 1999, korupsi diartikan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara. Sehingga dapat disimpulkan korupsi sebagai

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

perilaku menyimpang dari nilai-nilai kebenaran yang mengakibatkan kerugian baik langsung maupun tidak langsung kepada seseorang, sekelompok orang, lembaga atau negara.

Terkait hal tersebut di atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam *Strategi Pemberantasan Korupsi* menjabarkan jika perilaku korupsi dapat disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

a. Aspek Individu Pelaku

- 1) Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
- 2) Moral yang kurang kuat; Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- 3) Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.
- 4) Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- 5) Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk

melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

- 6) Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
- 7) Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

b. Aspek Organisasi

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan; Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
- 2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar; Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- 3) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai; Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen; Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
 - 5) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi; Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
- c. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
- 1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
 - 2) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
 - 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
 - 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

- d. Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.
- e. Dampak perilaku korupsi bagi negara dan masyarakat.

Faturohman Albantani (2011) mengemukakan, berkaitan dengan dampak yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat dua konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:

- 1) Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang;
- 2) Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal;
- 3) Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme;
- 4) Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 5) Korupsi mengakibatkan sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Sedangkan Korupsi yang sistematis dapat menyebabkan:

- 1) Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif;

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

- 2) Biaya politik oleh penjarahan atau pengangsiran terhadap suatu lembaga publik; dan
- 3) Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya

Dalam kasus korupsi yang merajalela di negeri kita ini, menurut saya kemungkinan yang pertama, mereka para pemimpin yang korupsi dalam dirinya memang sudah terbawa karakteristik atau naluri agresi, rakus atau tamak, dan material. Sehingga dengan itu, diketika mereka menjadi pemimpin yang kesehariannya tidak lepas dengan yang namanya uang, maka disaat ada kesempatan mereka akan rela untuk melakukan apapun termasuk korupsi demi memenuhi semua keinginannya, tanpa memikirkan apa akibat yang akan diterimanya dan juga akibat pada yang lain terutama kepada rakyat.

Kemungkinan yang kedua, mungkin mereka memang keturunan dari orang-orang yang suka berbohong. Dan mungkin juga mereka adalah keturunan dari orang-orang yang memang sudah terbiasa melakukan korupsi. Inilah hal yang paling kuat bagi mereka untuk berperilaku korupsi disaat ada kesempatan. Sebab, jika mereka sudah tahu bahwa keluarganya adalah orang yang terbiasa korupsi, maka sangat gampang juga bagi mereka untuk menirunya, karena dalam diri mereka terdapat gen korupsi yang dibawa dari sejak lahir.

Sosiologi korupsi v.s Sosiologi Agama

a. Sosiologi Korupsi

Istilah "sosiologi" kali pertama digagas oleh Auguste Comte (1798-1857), yang berarti studi mengenai masyarakat dipandang dari satu segi tertentu. Seperti Herbert Spencer (1820-1903), Comte menekankan masyarakat sebagai unit dasar dalam analisa sosiologis. Sedangkan aneka ragam kelembagaan dan interrelasi antar lembaga merupakan sub unit dari analisa.⁷ Karena itu pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia; namun tidak terkonsentrasi pada tingkah laku individual tetapi juga secara kolektif.

⁷*Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer* (LP3ES, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial, 1986).

Berbicara masalah sosiologi, tidak terlepas membicarakan sosok Max Weber (1864-1930) yang berusaha memberikan pengertian mengenai perilaku manusia dan sekaligus menelaah sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Konsep sosiologi Weber dapat dipandang sebagai upaya yang menengahi antara dua cara pandang yang bertentangan. Cara pandang pertama yang diilhami oleh keberhasilan ilmu alam—metode ilmu alam telah memacu perkembangan studi manusia dan masyarakat. Cara pandang kedua, menekankan bahwa sesuatu yang penting dalam manusia—spirit, pikiran, budaya dan sejarahnya—tidak akan mampu dipahami melalui teknik-teknik ilmu alam.

Menurut Weber, dalam memahami sosio-budaya diperlukan metode khusus dalam rangka memahami berbagai motif dan arti atau makna tindakan manusia. Dengan pengertian semacam ini, sosiologi merupakan suatu ilmu yang melibatkan dirinya dengan suatu penafsiran dan tindakan manusia secara sensitif. Dalam *The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism* (1904), Weber membahas masalah hubungan antara berbagai kepercayaan keagamaan dan etika praktis, khususnya etika dalam kegiatan ekonomi di kalangan masyarakat Barat sejak abad ke-16 hingga sekarang. Weber sampai pada kesimpulan bahwa kebangkitan kapitalisme didukung oleh sikap yang ditentukan oleh Protestanisme asetik. Jadi bukan (kekuatan) ekonomi yang menentukan agama, tetapi agamalah yang menentukan arah perkembangan ekonomi.

Weber menyatakan bahwa para pemimpin reformasi protestan tidak bermaksud menegakkan pondasi semangat untuk suatu masyarakat kapitalis dan seringkali mengecam kecenderungan kapitalis di jaman mereka. Namun, revolusi industri dan pertumbuhan bisnis berskala besar jauh lebih cepat berkembang di daerah Protestan daripada di daerah Katolik, dan daerah-daerah yang berbau Protestan jauh lebih giat dalam pengembangan bisnis.

Yang menarik dari uraian Weber adalah ketika membicarakan agama dari sudut fungsi. Weber menyebut fungsi manifes dan laten agama. Fungsi agama adalah memperkuat hukum/aturan moral masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Definisi fungsional sering menimbulkan kesalahfahaman antara fungsi manifes dan fungsi laten. Robert Merton mengatakan fungsi manifes adalah fungsi yang diakui dan diharapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi laten adalah akibat yang tidak

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

diharapkan. Salah satu fungsi manifes gereja adalah mempersatukan komunitas dalam semangat persaudaraan; sedangkan fungsi latennya adalah membagi komunitas berdasarkan ras dan kelas. Walaupun mengkhotbahkan "di hadapan Allah semua orang adalah sama", namun gereja memamerkan perbedaan kekayaan yang nampak pada para anggota yang berpakaian bagus dan yang sangat sederhana pada hari Minggu.

Bahkan ketika berbicara aspek kelas, ras dan etnis dalam agama, menurut Weber institusi agama dari sebuah masyarakat tercipta dan didominasi oleh golongan penguasa dalam masyarakat. Fungsi agama memberi dorongan moral serta jalan keluar secara psikologi dengan tetap memertahankan struktur kelas. Sedangkan Durkheim memandang agama sebagai potensi yang menciptakan pergerakan dan dapat mengubah tatanan sosial. Dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut tidak mengherankan jika sebagian pekerjaan empiris dalam sosiologi agama berkaitan antara masalah hubungan agama dengan kelas sosial.

Dalam konteks agama Kristen, Weber memperkenalkan istilah "asketisme dunia bathin" untuk mengimbangi para aktivis puritan dengan pendeta Katholik. Pendeta yang semakin dekat dengan dunia maka semakin kecil pula pengaruhnya; sedangkan bila aktivis Puritan semakin dekat maka dia akan semakin besar pengaruhnya. Tentang "rasional" kata Weber tidak sama dengan "berdasarkan empirik" atau "ilmiah", sebab efektifitas sarana untuk mendapatkan keselamatan tidak dapat dinilai dengan bukti empirik. Dalam konteks magis dan mistisisme sebagai hal-hal yang irrasional, meskipun dari sudut pandang pelakunya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh pelaku.

b. Sosiologi Agama

Agama jika dipandang dari sudut sosiologis tidak ditimba dari "pewahyuan" yang datang dari "dunia luar" namun dari eksperien, atau pengalaman konkret sekitar agama yang dikumpulkan dari masa lampau hingga kejadian sekarang. Artinya definisi agama menurut sosiologi adalah definisi yang empiris. Sehingga dari sudut fungsional agama dapat didefinisikan sebagai suatu institusi yang lain, yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik di lingkup lokal, regional,

nasional maupun mondial. Dengan demikian agama dilihat dari sudut dayaguna dan pengaruh terhadap masyarakat.⁸

Agama sebagai sistem budaya, merupakan konsep antropologis yang diungkapkan oleh Clifford Geertz. Dalam pandangan antropologi, pengalaman agama dianggap sebagai suatu kreasi manusia untuk menuju jalan hidup yang bervariasi, sesuai latar belakang pengetahuan, kepercayaan, norma dan nilai-nilai yang dianut. Dalam tulisannya yang lain Abdullah Ali mengatakan Weber menggambarkan agama sebagai fenomena yang rumit dan kompleks, yang dapat memenuhi beberapa fungsi sekaligus. Ia menggambarkan dimensi-dimensi agama berdasarkan pendapat Glock dan Stark, sebagai: 1) dimensi kepercayaan atau keyakinan beragama disebut juga sebagai dimensi ideologi, 2) Dimensi ritual berkaitan dengan praktek pelaksanaan agama, 3) Dimensi pengalaman keagamaan, 4) Dimensi pengetahuan dan 5) Dimensi konsekuensi beragama.

Nurchalish Madjid menjelaskan hubungan agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, sedangkan budaya—meskipun berdasarkan agama, dapat berubah. Oleh karena itu agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Dalam hal ini agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (religious).⁹ Para ilmuwan sosial menghadapi banyak kesulitan dalam merumuskan agama dengan tepat. Masalah pokok dalam mencapai suatu definisi yang baik ialah dalam menentukan di mana batas-batas gejala itu harus ditempatkan. Seperti dikemukakan Robertson (1970), ada dua jenis utama definisi tentang agama yang telah diusulkan oleh ilmuwan sosial, yang inklusif dan eksklusif.

Suatu agama ialah suatu sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang bertalian dengan hal-hal yang suci, yakni hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dan praktik-praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral yang disebut gereja, semua mereka yang terpaut satu sama lain (Durkheim, 1965). Saya merumuskan agama sebagai seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia

⁸*Islam dalam perspektif sosiologi agama* (Titian Ilahi Press, 1996).

⁹*Esai-esai sosiologi agama; Sosiologi Agama* (Kanisius, n.d.).

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

dengan kondisi akhir eksistensinya (Bellah, 1964). Jadi, agama dapat dirumuskan sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik di mana suatu kelompok manusia berjuang menghadapi masalah-masalah akhir kehidupan manusia (Yinger, 1970).

Definisi pertama yang dikemukakan di atas sangat terkenal dan telah dikutip berulang kali oleh banyak sosiolog. Bagi Durkheim, karakteristik agama yang penting ialah bahwa agama itu diorientasikan kepada sesuatu yang dirumuskan oleh manusia sebagai suci, yakni objek referensi, yang dihargai, dan malah dahsyat. Sedangkan definisi kedua dan ketiga menekankan agama di atas segala-galanya, diorientasikan kepada "penderitaan akhir" (*ultimate concern*) umat manusia.

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, agama berasal dari bahasa sansekerta, yang pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Syiwa. Terdapat tiga pendapat yang dapat dijumpai berkenaan dengan arti harfi kata agama. Pertama mengartikan tidak kacau, kedua tidak pergi (maksudnya diwarisi turun-temurun), dan ketiga jalan berpergian (maksudnya jalan hidup). Hampir semua agama diketahui mengandung empat unsur penting, yaitu (a) pengakuan bahwa ada kekuatan gaib yang menguasai, (b) keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib, (c) sikap emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu, seperti sikap takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah, dan lain-lain dan (d) tingkah laku tertentu yang dapat diamati, seperti shalat (sembahyang), doa, puasa, suka menolong, tidak korupsi, dan lain-lain. Tiga unsur pertama merupakan jiwa agama, sedangkan unsur keempat merupakan bentuk lahiriyah.

Masyarakat maju atau modern yang beragama, pada umumnya cenderung pada paham monoteisme, yakni meyakini keesaan Tuhan yang menciptakan segenap alam; tidak ada Tuhan selain Dia, seperti rumusan syahadat (tidak ada Tuhan selain Allah). Lebih lanjut, dalam upaya pemberantasan korupsi, keterlibatan semua pihak adalah salah satu prasyarat yang tidak bisa dihindarkan. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak kalangan. Salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam membangun gerakan sosial anti korupsi adalah tokoh-tokoh agama yang dalam kehidupan masyarakat memegang peran cukup sentral. Keterlibatan agamawan dalam upaya pemberantasan

korupsi akan memberikan motivasi dan dorongan yang kuat bagi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam menggalakkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air, Islam sebagai agama dapat berperan dalam beragam bentuk sebagaimana berikut: Pertama, nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap kian menyebarnya praktek korupsi. Kedua, agar nilai-nilai moralitas Islam tersebut dapat berfungsi sebagai modal untuk membangun etika sosial baru yang memberdayakan rakyat kecil dan memandang korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan.

Etika sosial baru tersebut dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa menjauhkan diri dari praktek korupsi, melahirkan semangat mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mencegah, mengawasi, melaporkan dan jika mungkin memperbaiki sejumlah mekanisme sanksi sosial yang hidup di masyarakat yang diberlakukan kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan korupsi. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai moralitas ini pun diharapkan dapat diturunkan dalam kerangka aturan-aturan hukum Islam (*fiqih*) mengenai korupsi.

Selanjutnya, untuk memperoleh pengejawantahan yang memadai, peran ketiga yang dapat dilakukan adalah agar nilai-nilai moralitas Islam dapat diajukan sebagai salah satu sumber bagi penyusunan aturan-aturan hukum maupun suplemen kebijakan yang berpengaruh bagi kemaslahatan umat, dengan orientasi pemberdayaan masyarakat kecil dan penekanan terhadap praktek korupsi.

Berbicara tentang agama, setidaknya terdapat dua hal yang patut diperhatikan, yaitu: *pertama* mengenai nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam ajaran-ajaran yang disampaikan agama; *kedua*, mengenai institusi sosial keagamaan sebagai penyokong berjalannya kehidupan beragama.

Dalam konteks perlawanan terhadap tindakan korupsi di Indonesia, peranan institusi sosial keagamaan menjadi sangat penting sebagai pendorong. Dari segi ini, institusi sosial keagamaan mestinya dapat dipertimbangkan sebagai salah satu garda dalam upaya pemberantasan korupsi, bergandengan tangan dengan gerakan anti korupsi dari kalangan masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama strategis sesuai dengan perannya masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi. Dari sini,

*Peran Sosiologi Agama dalam Pemecahan Masalah
Budaya dan Perilaku Korupsi*

institusi sosial keagamaan dengan agamawan perlu mendapatkan penekanan mengingat posisi strategisnya dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Sebagai kejahatan luar biasa, pemberantasan korupsi hanya bisa berhasil melalui cara-cara yang luar biasa pula. Masyarakat meragukan cara-cara struktural yang justru terkesan kian menumbuhsururkan praktek korupsi.

Penutup

Masalah sosial seperti korupsi perlu ditelaah dari pendekatan perilaku korupsi. Secara garis besar ada tiga hal yang dapat menyebabkan perilaku korupsi yaitu pertama, psikologi aliran “behaviouris” yang beranggapan perilaku manusia kebanyakan dipengaruhi (tidak ditentukan) oleh faktor-faktor yang ada di luar dirinya. Kedua, faktor lingkungan kerja yang memang koruptif di mana korupsi sudah saling keterkaitan antara individu dengan individu lainnya. Ketiga, faktor kepribadian.

Dalam hal itu, setiap agama pasti melarang perbuatan korupsi. Para pelaku korupsi tahu pasti setiap agama melarang dan mengutuk tindakan tersebut. Mungkin dengan pendekatan agama bisa dipakai untuk pencegahan yang bersifat kultural. Singkatnya, dalam upaya memberantas korupsi, peranan agamawan (ulama, kyai, ustadz, da’i) dengan institusi sosial keagamaannya sangat strategis. Agamawan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat tentu sangat efektif dalam menyosialisasikan pesan-pesan agama anti korupsi.¹¹ Lebih lanjut keberadaan agama menjadi alat kontrol terhadap perilaku-prilaku negatif di masyarakat, yang selanjutnya membawa mereka pada suatu *decision*, apakah peluang dan kesempatan melakukan tindak korupsi, dan sejauh mana mereka terbentengi dengan penguasaan dan kekuatan iman mereka, untuk berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral dan agama.***

Daftar Pustaka

Binawan, Al Andang L., and Franz Magnis-Suseno. *Korupsi Kemanusiaan: Menafsirkan Korupsi (dalam) Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

¹⁰Intan, *Salahkah George berantas korupsi?*

¹¹Mas Alim Katu, *Korupsi malu ah!: strategi jitu pemberantasan korupsi dengan hadis nabi dan nilai sirik na pacce* (Pustaka Refleksi, 2007).

Sinarwidi

- Esai-esai sosiologi agama*. Yogyakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Guhan, Sanjivi, and Paul Samuel. *Corruption in India: Agenda for Action*. Public Affairs Centre, 1997.
- Intan, Nurjannah. *Salahkah George berantas korupsi?* Yogyakarta: Bangkit Publisher, 2010.
- Islam dalam perspektif sosiologi agama*. Titian Ilahi Press, 1996.
- Iyubenu, Edi AH. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Ircisod, 2002.
- Katu, Mas Alim. *Korupsi Malu Ah!: Strategi Jitu Pemberantasan Korupsi dengan Hadis Nabi dan Nilai Sirik Na Pacce*. Pustaka Refleksi, 2007.
- Pryhantoro, Edy Herry Pryhantoro. *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*. Spasi, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Agama: Kajian tentang Perilaku Institusional dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*. Refika Aditama, 2007.
- Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, n.d.
- Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1986.